

ABSTRAK

Poligami bagi pegawai negeri sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan tentang poligami terhadap PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkara Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Pwl. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan tentang poligami terhadap PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkara Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Pwl. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui studi kepustakaan. Adapun kesimpulan penulis bahwa poligami yang dilakukan oleh PNS harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS/ASN. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4, yaitu harus memperoleh izin dari atasan secara tertulis, jika tidak melaporkan perkawinannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perkawinan, sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: Izin Perkawinan, Poligami, PNS.

ABSTRACT

Polygamy for civil servants is contained in Government Regulation Number 45 of 1990 amendment to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning marriage and divorce permits for civil servants. The problems raised in this study are how to regulate polygamy carried out by civil servants based on Government Regulation Number 45 of 1990 concerning marriage and divorce permits for civil servants and how judges consider them in granting case requests number 325/Pdt.G/2019/PA. Pwl. The purpose of this study is to find out the polygamy arrangements carried out by civil servants based on Government Regulation Number 45 of 1990 concerning marriage and divorce permits for civil servants and judges' considerations in granting case requests number 325/Pdt.G/2019/PA.Pwl. This research is a type of qualitative research that uses a normative juridical approach, namely a research approach by researching and studying research objects through library research. As for the author's hypothesis that polygamy practiced by civil servants must be in accordance with the applicable laws and regulations, namely Government Regulation number 45 of 1990 concerning marriage and divorce permits for civil servants/ASN. As formulated in Article 4, that is, they must obtain written permission from their superiors, if they do not report their marriage within a period of no later than 1 (one) month from the start of the marriage, so that they can be subject to severe disciplinary punishment in accordance with what is regulated in Government Regulation Number 53 The year 2010 regarding the discipline of civil servants.

Keywords: Marriage Permit, Polygamy, Civil Servants.